COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR ROB DI KELURAHAN BONTANG KUALA, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ika Risalatul Hasanah
NPP. 33.0804
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: ikarisalatul@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Petrus Polyando, S.STP, M.Si
Email: petruspholl@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This study is grounded in the paradox of disaster risk reduction implementation for tidal flooding in coastal areas, particularly in Bontang Kuala Village, where collaborative efforts among stakeholders have been formally initiated by the government, yet empirically have not been able to reduce the frequency or impact of disaster-related losses. This condition indicates a gap between the normative construction of Collaborative Governance and its practical implementation, which remains partial, reactive, and not yet strongly institutionalized. Therefore, a more in-depth analysis is required to understand the dynamics of collaboration among actors in disaster risk reduction.* ***Purpose:*** *The pupose of this study is to describe the dynamics of Collaborative Governance in tidal flood disaster risk reduction in Bontang Kuala Village.* ***Method:*** *This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The research involved five informants representing government institutions, affected communities, local business actors, and non-governmental organizations, selected through purposive sampling. Data analysis was conducted using the collaborative governance framework proposed by Ansell and Gash, which encompasses the dimensions of starting conditions, facilitative leadership, institutional design, and collaborative process.* ***Result:*** *The result indicate that the practice of collaborative governance is still in a transitional phase. The existing collaboration tends to be responsive during disaster events, while preventive aspects have not yet been optimally developed. The government remains the dominant central actor, whereas community and private sector involvement is still limited and not strategically integrated. Additionally, limitations in data availability, technical documentation, and resources serve as major barriers to strengthening collaboration.****Conclusion:*** *This study concludes that Collaborative Governance in tidal flood disaster risk reduction in Bontang Kuala Village has not yet been strongly institutionalized, thus requiring reinforcement in institutional aspects, distribution of actor roles, and a shift toward more preventive and sustainable collaboration.*

Keywords: *Collaborative Governance; Coastal Area; Disaster Risk Reduction; Tidal Flood*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini berangkat dari paradoks implementasi pengurangan risiko bencana banjir rob di wilayah pesisir, khususnya di Kelurahan Bontang Kuala, di mana upaya kolaboratif antar aktor telah diinisiasi secara formal oleh pemerintah, namun secara empiris belum mampu menekan intensitas kejadian maupun dampak kerugian yang ditimbulkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif *Collaborative Governance* dengan praktik di lapangan yang masih bersifat parsial, reaktif, dan belum terinstitusionalisasi secara kuat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami dinamika kolaborasi antar aktor dalam pengurangan risiko bencana. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dinamika *Collaborative Governance* dalam pengurangan risiko bencana banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 5 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat terdampak, pelaku usaha lokal, dan lembaga swadaya masyarakat yang dipilih secara *purposive*. Analisis data menggunakan kerangka *collaborative governance* dari Ansell dan Gash yang meliputi dimensi *starting conditions*, *facilitative leadership*, *institutional design*, dan *collaborative process*. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *collaborative governance* masih berada pada fase transisional. Kolaborasi yang terbangun cenderung responsif saat bencana terjadi, sementara aspek preventif belum berkembang optimal. Pemerintah masih mendominasi sebagai aktor sentral, sedangkan masyarakat dan sektor swasta belum terintegrasi secara strategis. Selain itu, keterbatasan data, dokumen teknis, dan sumber daya menjadi hambatan utama dalam memperkuat kolaborasi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengurangan risiko bencana banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala belum terinstitusionalisasi secara kuat, sehingga memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, distribusi peran aktor, serta orientasi kolaborasi yang lebih preventif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Banjir Pesisir; Banjir Rob; *Collaborative Governance*; Pengurangan Risiko Bencana

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banjir rob di wilayah pesisir tidak lagi dapat dipahami semata sebagai fenomena alam, melainkan sebagai manifestasi dari kompleksitas persoalan lingkungan yang dipengaruhi oleh perubahan iklim global, tekanan pembangunan wilayah pesisir (IPCC, 2021), serta lemahnya tata kelola risiko bencana. Intensitas dan frekuensi kejadian banjir rob yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan yang selama ini dilakukan belum mampu menjawab akar permasalahan secara struktural. Dalam konteks ini, kegagalan bukan hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada bagaimana aktor-aktor yang terlibat membangun, mengelola, dan mempertahankan kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030 1*, 2015).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi kerentanan yang tinggi terhadap bencana pesisir, termasuk banjir rob yang berdampak langsung pada kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat. Tingginya eksposur risiko di wilayah pesisir memperlihatkan bahwa pengurangan risiko bencana tidak dapat lagi ditangani melalui pendekatan sektoral yang terfragmentasi. Sebaliknya, diperlukan suatu pendekatan tata kelola yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan, sumber daya, dan kapasitas aktor dalam satu kerangka kolaboratif yang adaptif dan berkelanjutan. Kota Bontang sebagai wilayah pesisir di Provinsi Kalimantan Timur merepresentasikan kondisi tersebut, di mana banjir rob terjadi secara berulang dengan dampak yang relatif stagnan dari waktu ke waktu. Kelurahan Bontang Kuala sebagai salah satu wilayah terdampak menunjukkan bahwa meskipun berbagai intervensi telah dilakukan oleh pemerintah, baik dalam bentuk program, kebijakan, maupun keterlibatan multipihak, namun hasil yang dicapai belum menunjukkan perubahan signifikan dalam menekan risiko maupun kerugian yang ditimbulkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola penanggulangan bencana, khususnya dalam aspek kolaborasi antar aktor.

Secara normatif, pendekatan *collaborative governance* telah diadopsi sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan publik yang kompleks, termasuk dalam pengurangan risiko bencana. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif dan berbasis *consensus* (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks administrasi publik Indonesia, *collaborative governance* juga dipandang sebagai instrumen penting dalam penyelesaian persoalan publik yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan membutuhkan koordinasi lintas sektor (Thahir, 2022). Namun demikian, dalam praktiknya, kolaborasi seringkali terjebak pada pola formalistik dan simbolik, di mana keterlibatan aktor lain belum sepenuhnya mencerminkan distribusi peran yang setara dan integratif. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya kapasitas kolaboratif dalam menghasilkan solusi yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa persoalan utama dalam pengurangan risiko bencana banjir rob tidak semata terletak pada kurangnya program, melainkan pada belum optimalnya dinamika *collaborative governance* yang terbentuk. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dinamika kolaborasi antar aktor dalam pengurangan risiko bencana banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala, dengan tujuan untuk mengungkap bagaimana relasi, peran, serta interaksi antar aktor berlangsung dalam konteks tata kelola bencana. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris, tetapi juga kontribusi konseptual dalam penguatan praktik *collaborative governance* yang lebih substantif, adaptif, dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penelitian ini berangkat dari kontradiksi struktural dalam praktik pengurangan risiko bencana (PRB) di wilayah pesisir, khususnya pada kasus banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala. Secara normatif, kerangka kebijakan global seperti *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015–2030 telah menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan multi-aktor dalam seluruh siklus manajemen bencana. Pemerintah daerah juga telah mengadopsi prinsip tersebut melalui berbagai dokumen perencanaan kebencanaan. Namun demikian, dalam

praktiknya, intensitas kejadian banjir rob serta dampak kerugian yang ditimbulkan menunjukkan kecenderungan stagnan, bahkan berulang, yang mengindikasikan kegagalan transformasi dari pendekatan sektoral menuju tata kelola kolaboratif yang efektif. Kondisi ini mencerminkan adanya disfungsi dalam operasionalisasi *collaborative governance*, di mana kolaborasi yang terbentuk belum mampu berfungsi sebagai mekanisme koordinasi yang adaptif, integratif, dan berorientasi pada pencegahan. Sebaliknya, pola interaksi antar aktor cenderung bersifat reaktif, terfragmentasi, dan bergantung pada dominasi pemerintah sebagai aktor sentral temuan serupa juga ditunjukkan oleh Thahir (2022) yang menemukan bahwa praktik *collaborative governance* dalam kebijakan pascabencana masih menghadapi kendala dalam optimalisasi peran antaraktor. Selain itu, lemahnya desain kelembagaan dan koordinasi lintas sektor juga menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif yang efektif (Premilasari et al., 2023). Ketimpangan kapasitas antar aktor, keterbatasan basis data risiko, serta absennya desain kelembagaan yang jelas turut memperkuat indikasi bahwa kolaborasi yang terjadi masih berada pada level simbolik, belum mencapai tahap institusionalisasi yang substantif.

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pengurangan risiko bencana di wilayah pesisir maupun pentingnya kolaborasi antar aktor, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif, evaluasi program, atau efektivitas kebijakan secara umum. Selain itu, studi lanjutan juga menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses interaksi antar aktor yang berlangsung secara konsisten (Emerson et al., 2012). Kajian yang secara spesifik mengurai dinamika internal *collaborative governance* terutama dalam konteks hubungan kekuasaan, distribusi peran, serta interaksi lintas aktor di tingkat lokal masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan, dan proses kolaborasi saling berinteraksi dalam membentuk (atau justru menghambat) efektivitas PRB di wilayah pesisir yang rentan seperti Bontang Kuala.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika *collaborative governance* dalam pengurangan risiko banjir rob, tidak hanya sebagai kerangka konseptual, tetapi sebagai praktik sosial-politik yang dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, distribusi sumber daya, serta relasi antar aktor. Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap mengapa kolaborasi yang secara formal telah dibangun belum mampu menghasilkan dampak yang signifikan, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam pengembangan studi tata kelola kolaboratif di sektor kebencanaan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat banjir rob di wilayah pesisir, khususnya di Kelurahan Bontang Kuala, menunjukkan pola kejadian yang berulang dengan dampak yang relatif stagnan, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang ada, termasuk kolaborasi antar aktor, belum berjalan secara optimal dalam menekan risiko bencana. Secara keilmuan, penelitian ini mengisi keterbatasan kajian *collaborative governance* dalam konteks pengurangan risiko bencana di tingkat lokal, khususnya pada karakteristik bencana pesisir yang kompleks. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar

empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kolaboratif yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi preventif. Tanpa kajian ini, kebijakan pengurangan risiko bencana berpotensi tetap bersifat parsial dan reaktif, sehingga upaya mitigasi tidak berkembang secara sistematis dan kerentanan masyarakat pesisir cenderung berlanjut.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks pengurangan risiko bencana dan *collaborative governance*. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian kebencanaan dan kolaborasi memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan. Putiamini, mengkaji kerentanan sosial masyarakat pesisir terhadap banjir rob di Indramayu menggunakan metode campuran dengan pendekatan kerentanan sosial (Putiamini et al., 2022). Dwirahmadi, meneliti integrasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui kolaborasi antar lembaga di Jakarta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *collaborative governance* (Dwirahmadi et al., 2023). Putti, mengkaji persepsi risiko dan jejaring sosial masyarakat pesisir di Jakarta Utara menggunakan pendekatan *social network analysis* (Putti et al., 2023). Windartik meneliti hubungan antara tingkat pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir menggunakan metode kuantitatif (Windartik & Ima Rahmawati, 2023) . Al-Hasna mengkaji praktik *collaborative governance* dalam mitigasi banjir rob di Pekalongan menggunakan metode kualitatif deskriptif (Hasna & Darumurti, 2023).

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoritis serta variasi objek penelitian yang berbeda-beda sesuai fokus kajian masing-masing.

1.5. Pernyataan Kebaruan

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengalihkan fokus kajian dari yang selama ini dominan pada aspek kerentanan dan kesiapsiagaan menuju analisis kritis atas kesenjangan antara desain normatif dan praktik *collaborative governance* dalam pengurangan risiko bencana banjir rob. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik mengkaji dinamika kolaborasi antar aktor di tingkat lokal, yaitu di Kelurahan Bontang Kuala, sebagai wilayah pesisir dengan karakteristik paparan banjir rob yang berulang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berskala makro, penelitian ini menyoroti bagaimana kolaborasi benar-benar dijalankan pada level paling dekat dengan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan model Chris Ansell dan Alison Gash secara utuh, sehingga mampu mengungkap bahwa kolaborasi yang terbentuk masih bersifat parsial, didominasi oleh pemerintah, dan belum terinstitusionalisasi secara kuat. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan kritis terhadap praktik kolaborasi di tingkat lokal yang tidak otomatis efektif, meskipun secara formal telah dibangun.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika *collaborative governance* dalam pengurangan risiko bencana banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap dinamika interaksi antar aktor dalam pengurangan risiko bencana banjir rob. Pendekatan ini dipilih karena fenomena *collaborative governance* tidak dapat direduksi menjadi variabel kuantitatif semata, melainkan membutuhkan eksplorasi kontekstual terhadap relasi kekuasaan, kepercayaan, serta praktik kelembagaan yang berkembang di tingkat lokal (Creswell & Creswell, 2018). Dengan demikian, pendekatan kualitatif dinilai paling memadai untuk mengungkap kompleksitas proses kolaborasi yang bersifat dinamis, non-linear, dan kontekstual (Ansell & Gash, 2008)

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk menggali persepsi, pengalaman, serta kepentingan masing-masing aktor yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana. Observasi dilakukan untuk menangkap praktik nyata interaksi kolaboratif di lapangan, sementara dokumentasi berfungsi sebagai instrumen verifikasi terhadap data empiris yang diperoleh. Kombinasi teknik ini memungkinkan triangulasi data yang lebih kuat dalam memahami fenomena kolaborasi (Emerson et al., 2012). Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pengurangan risiko bencana banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala. Informan terdiri dari unsur pemerintah (BPBD Kota Bontang dan aparat kelurahan), masyarakat pesisir terdampak, serta pelaku usaha lokal. BPBD Kota Bontang dan Lurah Bontang Kuala diposisikan sebagai informan kunci karena memiliki peran strategis dalam koordinasi kebijakan dan implementasi program. Pemilihan informan multi-aktor ini didasarkan pada asumsi bahwa *collaborative governan*ce hanya dapat dipahami secara komprehensif apabila melibatkan perspektif yang beragam (Agranoff, 2012). Selain itu, keberhasilan *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor membangun komunikasi, koordinasi, dan komitmen bersama dalam mencapai tujuan publik (Harahap et al., 2023).

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai aktor untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data. Pendekatan ini digunakan untuk meminimalkan bias perspektif serta memperkuat validitas temuan penelitian (Sugiyono, 2013). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara simultan untuk mengidentifikasi pola interaksi, bentuk kolaborasi, serta faktor penghambat dalam pengurangan risiko bencana (Miles, 2014) . Kerangka analisis merujuk pada model collaborative governance dari Ansell dan Gash yang mencakup dimensi *starting conditions, facilitative leadership, institutional design,* dan *collaborative process.*

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bontang Kuala, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai wilayah pesisir dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir rob. Penelitian berlangsung dalam rentang waktu Agustus 2025 hingga Juni 2026, dengan fokus pengumpulan data lapangan pada periode observasi dan wawancara. Rentang waktu tersebut memungkinkan peneliti menangkap dinamika kolaborasi secara lebih komprehensif dalam konteks kejadian rob yang bersifat berulang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis melakukan analisis terhadap dinamika kolaborasi antar aktor dalam pengurangan risiko bencana banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala. Analisis dilakukan berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel sebagai alat bantu analisis.

3.1 *Starting Conditions*

Penulis melakukan analisis terhadap kondisi awal (*starting conditions*) yang mempengaruhi terbentuknya kolaborasi antar aktor dalam pengurangan risiko bencana banjir rob.

Tabel 1
Kondisi Awal Kolaborasi Antar Aktor

Aspek	Temuan Lapangan	Indikasi
Kerentanan Wilayah	Genangan rob terjadi rutin	Risiko tinggi
Sumber Daya	Bantuan dominan dari BPBD	Ketimpangan
Ketergantungan	Masyarakat menunggu arahan	Relasi tidak setara
Kesadaran	Ada gotong royong	Mulai terbentuk

Sumber: Hasil pengolahan data dan riset 2026

Berdasarkan **Tabel 1**, kondisi awal kolaborasi menunjukkan bahwa kerentanan wilayah menjadi faktor dominan. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa genangan air laut terjadi secara berulang dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan masyarakat yang menyatakan bahwa “kalau air pasang besar, hampir semua rumah di bagian bawah tergenang”.

Selain itu, distribusi sumber daya menunjukkan adanya ketimpangan. Bantuan logistik dan penanganan darurat lebih banyak berasal dari BPBD. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak kelurahan yang menyatakan bahwa “kalau sudah banjir, biasanya BPBD yang paling cepat turun bawa bantuan”. Pada aspek ketergantungan, data menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menunggu arahan sebelum bertindak. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan bahwa “kami biasanya tunggu informasi dari RT atau BPBD dulu sebelum evakuasi”.

Namun demikian, terdapat indikasi kesadaran kolektif yang mulai berkembang, terlihat dari kegiatan gotong royong dan pelaporan kondisi banjir melalui grup komunikasi warga.

Berdasarkan data tersebut, kondisi awal kolaborasi menunjukkan adanya kebutuhan tinggi terhadap kolaborasi, namun belum didukung oleh distribusi peran yang seimbang antar aktor.

Lebih lanjut, pola interaksi yang terbentuk pada kondisi awal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang berlangsung masih bersifat responsif terhadap situasi darurat, bukan sebagai hasil dari perencanaan yang terstruktur. Hal ini terlihat dari kecenderungan aktor untuk mulai berkoordinasi setelah terjadi banjir, bukan pada tahap mitigasi sebelumnya. Hasil wawancara dengan salah satu informan dari unsur masyarakat menyebutkan bahwa "biasanya koordinasi itu ramai kalau sudah air naik, kalau belum ya jarang dibahas". Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik kolaborasi yang terjadi masih berorientasi pada penanganan dampak, bukan pada upaya pencegahan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas kolaboratif antar aktor belum sepenuhnya berkembang secara proaktif dalam kerangka pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa kondisi awal kolaborasi ditandai oleh adanya kontradiksi antara kebutuhan kolaborasi yang tinggi akibat risiko bencana, dengan keterbatasan struktural berupa ketimpangan sumber daya dan relasi kekuasaan yang belum seimbang.

3.2 Desain Institusional

Penulis melakukan analisis terhadap desain institusional kolaborasi yang meliputi aspek aturan, mekanisme, dan keterlibatan aktor.

Tabel 2

Desain Institusional Kolaborasi

Aspek	Temuan Lapangan	Indikasi
Regulasi	Mengacu aturan nasional	Formal tersedia
Forum Kolaborasi	Tidak ada forum rutin	Tidak terstruktur
Perencanaan	Tidak ada dokumen rob khusus	Lemah
Keterlibatan Aktor	Aktif saat bencana saja	Tidak berkelanjutan

Sumber: Hasil pengolahan data dan riset 2026

Berdasarkan **Tabel 2**, desain institusional menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi formal, implementasi di tingkat lokal belum berjalan secara optimal.

Hasil wawancara dengan aparat kelurahan menyatakan bahwa "koordinasi biasanya dilakukan kalau sudah terjadi banjir, belum ada forum rutin khusus membahas rob". Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kolaborasi belum terlembaga. Ketiadaan forum kolaborasi formal juga menyebabkan interaksi antar aktor berlangsung secara sporadis dan tidak berkelanjutan.

Selain itu, tidak adanya dokumen perencanaan khusus seperti rencana kontingensi rob memperlihatkan lemahnya kesiapsiagaan dan berimplikasi pada tidak jelasnya pembagian peran antar aktor. Kondisi ini memperkuat dominasi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan dari BPBD bahwa "penanganan masih berdasarkan

pengalaman lapangan, belum ada rencana khusus untuk rob". Dari sisi keterlibatan, data menunjukkan bahwa aktor non-pemerintah lebih banyak terlibat pada saat pelaksanaan, bukan pada tahap perencanaan. Berdasarkan observasi, masyarakat dan pihak lain cenderung aktif saat distribusi bantuan atau evakuasi.

Penulis juga menilai bahwa keterlibatan aktor non-pemerintah masih bersifat terbatas dan cenderung terjadi pada tahap implementasi, bukan pada tahap perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbentuk belum mencapai tingkat deliberatif. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa desain institusional dalam penelitian ini masih lemah dalam mendukung terbentuknya kolaborasi yang inklusif, setara, dan berkelanjutan.

3.3 Proses *Collaborative Governance*

Penulis melakukan analisis terhadap proses kolaborasi antar aktor dalam praktik pengurangan risiko bencana banjir rob.

Tabel.3

Proses Kolaborasi Antar Aktor

Aspek	Temuan Lapangan	Indikasi
Komunikasi	Grup *WhatsApp* RT	Informal
Koordinasi	Dipimpin kelurahan/BPBD	Terpusat
Keterlibatan	Tidak merata	Parsial
Sistem Pendukung	Tidak ada sistem khusus	Terbatas

Sumber: Hasil pengolahan data dan riset 2026

Berdasarkan **Tabel 3**, proses kolaborasi menunjukkan bahwa komunikasi antar aktor berjalan melalui media informal, seperti grup *WhatsApp*. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat yang menyatakan bahwa "kalau air mulai naik, biasanya langsung dilaporkan di grup RT".

Dari sisi koordinasi, peran pemerintah masih dominan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa "biasanya kelurahan yang menghubungi BPBD dan mengatur bantuan". Selain itu, keterlibatan aktor belum merata. Berdasarkan observasi, sektor swasta dan komunitas belum terlibat secara signifikan dalam kegiatan mitigasi. Proses kolaborasi juga cenderung terjadi pada saat bencana berlangsung. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa "kalau tidak banjir, jarang ada pembahasan khusus soal rob".

Penulis juga menganalisis bahwa koordinasi antar aktor masih bersifat terpusat pada pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan dalam *collaborative governance* belum sepenuhnya terwujud.

Selain itu, penulis menilai bahwa intensitas kolaborasi yang lebih tinggi pada fase tanggap darurat dibandingkan fase mitigasi menunjukkan adanya kecenderungan kolaborasi yang bersifat reaktif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses kolaborasi belum terintegrasi dalam keseluruhan siklus manajemen bencana.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa proses *collaborative governance* dalam penelitian ini masih berada pada tahap awal, yang ditandai dengan adanya interaksi antar aktor, namun belum mencapai tingkat integrasi dan keberlanjutan yang optimal.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis mendeskripsikan temuan penelitian ini dengan mengaitkannya pada hasil penelitian terdahulu terkait *collaborative governance* dalam pengurangan risiko bencana. Berdasarkan hasil deskripsi data di lapangan, terlihat bahwa kolaborasi antar aktor dalam pengurangan risiko bencana banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala telah berlangsung, meskipun belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural maupun operasional.

Secara umum, temuan penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Putiamini et al. (2022) dan Dwirahmadi et al. (2023) yang menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah memiliki peran dominan dalam penanganan bencana, khususnya pada wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan Putti (2023) yang menekankan pentingnya peran masyarakat melalui jejaring sosial dan solidaritas kolektif dalam menghadapi risiko bencana.

Namun demikian, penulis juga menemukan perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu. Berbeda dengan temuan Al-Hasna (2023) yang menunjukkan bahwa kolaborasi telah didukung oleh mekanisme kelembagaan yang relatif terstruktur, dalam penelitian ini kolaborasi justru cenderung bersifat reaktif dan belum didukung oleh desain institusional yang kuat. Selain itu, jika dalam penelitian Dwirahmadi et al. (2023) hambatan utama terletak pada rendahnya kepercayaan antaraktor, dalam penelitian ini hambatan lebih terlihat pada ketimpangan peran dan dominasi aktor pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga memberikan pemaknaan bahwa kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana di tingkat lokal masih berada pada tahap berkembang, di mana interaksi antar aktor telah terbentuk namun belum berjalan secara seimbang, terstruktur, dan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa temuan penting yang diperoleh penulis terkait dinamika kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana banjir rob di kelurahan Bontang Kuala, antara lain:

a. **Dominasi Aktor Pemerintah**: Kolaborasi masih terpusat pada pemerintah, khususnya BPBD, sehingga belum mencerminkan kesetaraan peran antaraktor;
b. **Kolaborasi Bersifat Reaktif**: Interaksi antar aktor lebih dominan terjadi saat bencana, belum optimal pada tahap mitigasi dan kesiapsiagaan;
c. **Kesadaran Kolektif Masyarakat**: Terdapat potensi partisipasi melalui gotong royong dan komunikasi komunitas, namun belum terintegrasi secara sistematis;
d. **Kelemahan Desain Institusional**: Belum adanya forum kolaborasi formal dan perencanaan terpadu menunjukkan lemahnya kelembagaan kolaborasi.

Secara keseluruhan, temuan ini menggambarkan bahwa praktik *collaborative governance* dalam pengurangan risiko bencana banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala masih memerlukan

penguatan, terutama pada aspek kelembagaan, distribusi peran, serta keberlanjutan kolaborasi antar aktor.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa temuan menarik lainnya dalam proses kolaborasi pengurangan risiko bencana banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala yang berkaitan dengan faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat utama yang ditemukan adalah ketimpangan peran antar aktor, di mana pemerintah masih menjadi aktor yang dominan sementara keterlibatan masyarakat dan pihak lain belum optimal. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta belum adanya forum kolaborasi formal juga menjadi kendala dalam memperkuat koordinasi antar pihak.

Di sisi lain, penulis juga menemukan adanya faktor pendukung yang berpotensi memperkuat kolaborasi, yaitu munculnya kesadaran kolektif masyarakat dalam menghadapi banjir rob. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan gotong royong, komunikasi melalui kelompok warga, serta inisiatif pelaporan kondisi lingkungan secara mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi belum berjalan optimal, terdapat modal sosial yang dapat menjadi dasar dalam penguatan *collaborative governance* ke depan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa dinamika *collaborative governance* dalam pengurangan risiko bencana banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala telah terbentuk, namun belum berjalan secara optimal. Kolaborasi antar aktor menunjukkan adanya interaksi melalui komunikasi dan kepercayaan yang cukup baik, namun masih didominasi oleh peran pemerintah, khususnya BPBD, serta cenderung bersifat reaktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam upaya mitigasi dan pencegahan jangka panjang. Dengan demikian, penguatan aspek kelembagaan, pemerataan peran antar aktor, serta pergeseran pendekatan menuju preventif menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan efektivitas pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu dan cakupan penelitian yang hanya berfokus pada satu lokasi, yaitu Kelurahan Bontang Kuala, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, keterbatasan akses data dan informan tertentu juga mempengaruhi kedalaman analisis dalam menggambarkan dinamika kolaborasi secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih bersifat awal, oleh karena itu disarankan adanya penelitian lanjutan pada wilayah pesisir lainnya dengan karakteristik serupa guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait praktik *collaborative governance* dalam pengurangan risiko bencana. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur tingkat efektivitas kolaborasi secara lebih terukur, serta mengeksplorasi model kelembagaan kolaboratif yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada Lurah Bontang Kuala beserta seluruh jajaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah memberikan izin, kesempatan, dan dukungan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan, masyarakat Kelurahan Bontang Kuala, serta pihak-pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam proses pengumpulan data, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agranoff, R. (2012). *Collaborating to Manage*. Georgetown University Press.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.* SAGE Publications.

Dwirahmadi, F., Barnes, P., Wibowo, A., Amri, A., & Chu, C. (2023). *Linking Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation through Collaborative Governance: Experience from Urban Flooding in Jakarta. Geosciences (Switzerland)*, *13*(11). . https://doi.org/10.3390/geosciences13110353.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory*, *22*(1), 1–29. . https://doi.org/10.1093/jopart/mur011.

Harahap, H. B. M., Suradinta, E., Maryani, D., & Averus, A. (2023). Fenomena Money Politik Terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, *11*(1), 59–72. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1407.

Hasna, A. L., & Darumurti, A. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Kota Pekalongan. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, *7*(1), 25–37. https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24210.

IPCC. (2021). *Ocean, Cryosphere and Sea Level Change. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Intergovernmental Panel on Climate Change.

Miles, M. B. (2014). *Qualitative Data Analysis - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana.* SAGE Publications.

Premilasari, Wasistiono, S., Prabowo, H., Rowa, H., & Alma'arif. (2023). Bagaimana *Open Government* Diterapkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah? *Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, *6*(1), 109–128. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/952.

Putiamini, S., Mulyani, M., Petala, M. P., Soesilo, T. E. B., & Karsidia, A. (2022). *Social vulnerability of coastal fish farming community to tidal (Rob) flooding: a case study from*

Indramayu, Indonesia. *Journal of Coastal Conservation*, *26*(2). https://doi.org/10.1007/s11852-022-00854-7

Putti, H. M. D. M., Shalih, O., N.R.Mardiah, A., & Abandhika, F. (2023). *View of Risk Perception in Facing Post-Disaster of 'Rob' Flood in North Jakarta Coastal Using Social Network Approach.*https://www.researchgate.net/publication/401822715_Risk_Perception_in_Facing_Post-Disaster_of_'Rob'_Flood_in_North_Jakarta_Coastal_Using_Social_Network_Approach.

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030 1. (2015). https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Thahir, B. (2022). *Is There Any Collaborative Governance on Post-disaster Social Policy in Banten Province? Jurnal Bina Praja*, *14*(2), 329–338. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/858.

Windartik, E., & Ima Rahmawati. (2023). *Knowledge with Flood Disaster Preparedness in Mojokerto District. Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*, *2*(2), 787–795. https://doi.org/10.58526/jsret.v2i2.158.